Disbudpar Banjarmasin Bangun Galeri Terapung dan Rumah Lanting, Kepala Dinas Sebut Tarik Investor

Galeri Terapung Sasirangan, di Kampung Sasirangan, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalsel.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banjarmasin, baru saja menyelesaikan pembangunan dua ikon wisata mengapung di atas sungai.

Ikon wisata baru tersebut berada di Kampung Sasirangan, Sungai Jingah. Selain wisata mengapung di Sungai Jingah, juga ada Rumah Lanting yang berlokasi di Kelurahan Mantuil, tak jauh dari Jembatan Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Di Kampung Sasirangan wisata air dibangun Gallery Terapung dengan bentuk khas kebudayaan Banjar, yaitu Tudung Tanggui. Sedangkan Rumah Lanting Mantuil bentuknya menyerupai Rumah Banjar.

(Diringkas dari https://klikkalsel.com/lirik-investor-disbudpar-banjarmasin-bangun-dua-ikon-wisata-sungai/)

Pembangunan galeri terapung itu dijelaskan Kepala Dibudpar Kota Banjarmasin, Ehsan El-Haq selain untuk melengkapi fasilitas destinasi wisata, juga sekaligus untuk menarik Investor.

"Supaya investor terpancing, ikut berpartisipasi mengembangkan wisata di kota kita ini," katanya. Selasa (01/12/2020).

Karena pembangunan ikon wisata tersebut atas dasar permintaan masyarakat sekitar, guna pengembangan wisata. Sehingga bangunan itu nantinya akan dihibahkan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Harapannya, nantinya dapat menambah nilai destinasi pariwisata, yang ada di kawasan tersebut.

"Nanti akan kami hibahkan kepada Pokdarwis, biar mereka yang mengelolanya," ujarnya.

Lanjut Ehsan menjelaskan, meski nantinya gerai terapung akan dikelola oleh Pokdarwis, Disbudpar Banjarmasin mengaku tetap akan melakukan pengawasan.

Yang paling utama adalah pengawasan terhadap proses pengelolaannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

"Yang akan di awasi adalah pengelolaannya, supaya tidak menimbulkan penurunan minat wisatawan, akibat adanya penyalahgunaan," jelasnya.

(Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/02/disbudpar-banjarmasin-bangun-galeri-terapung-dan-rumah-lanting-kepala-dinas-sebut-tarik-investor)

Ehsan juga menyebut, ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal peningkatan destinasi wisata susur sungai.

Ia menerangkan, bahwa pembangunan dua banguna tersebut dimulai pada bulan Oktober dan bersumber pada APBN yang berkisar tidak sampai Rp 200 Juta untuk paket pembangunan satu fasilitas terapung.

“Ini merupakan ikon wisata milik daerah kita yang memiliki ciri khas tersendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi Gallery Terapung Sungai Jingah, Mariani mengaku sangat senang dengan adanya bangunan tersebut.

“Alhamdulilah, kami warga di sini sangat menyambut baik keberadaan bangunan galeri ini. Kampung kami jadi terangkat namanya,” ujarnya.

Namun ia masih sangat menyayangkan perilaku oknum warga sekitar yang masih suka membuang sampah sembarangan.

“Sayangnya masih ada warga yang suka buang sampah sembarangan. Itu saja ada kantongan plastik sampah yang nyangkut di depan galeri,” tukasnya sembari menunjuk ke arah tumpukan sampah.

Sehingga, ia berharap kepada Pemerintah Kota bisa menertibkan warga yang bandel tersebut. “Ini demi kenyamanan kita bersama juga, kalau sungai kita bersih, semua orang pasti akan menikmati dampaknya,” tandas Mariani.

(Diringkas dan dikutip dari https://suarindonesia.com/galeri-terapung-dan-rumah-lanting-guna-gaet-investor-di-bidang-wisata/)

Sumber Berita:

1. **www.klikkalsel.com**, *Lirik Investor, Disbudpar Banjarmasin Bangun Dua Ikon Wisata Sungai*, 1 Desember 2020.
2. **www.banjarmasin.tribunnews.com**, *Disbudpar Banjarmasin Bangun Galeri Terapung dan Rumah Lanting, Kepala Dinas Sebut Tarik Investor*, 2 Desember 2020.
3. **www.suarindnesia.com**, *GALERI Terapung dan Rumah Lanting, Guna Gaet Investor di Bidang Wisata*, 1 Desember 2020.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu,

meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.

- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.